

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA GOLPUT PADA PILPRES TAHUN 2014
DI MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TERKAIT FATWA MUI TENTANG GOLPUT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatra Utara**

OLEH :

**DEDIWANSAH SOLIN
NIM : 23.13.3.005**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUMATRA UTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH
TAHUN 2016-2017**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA GOLPUT PADA PILPRES TAHUN 2014 DI MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TERKAIT FATWA MUI TENTANG GOLPUT** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Sumatra Utara, pada tanggal 22 Agustus 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah pada jurusan Siyasa.

Medan, 22 Agustus 2017

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syari'ah UIN – SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah, Sag. MA

NIP: 197103021997032002

Dr. Dihaudhin Tanjung, SHI. MA

NIP: 197910202009011010

Anggota – anggota

1. Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag

Nip: 196809101995031001

2. Drs. Eldhin H. Zainal, M.Ag

NIP: 195606121980031009

3. Irwan M.Ag

NIP: 197212152001121004

4. Fatimah S.Ag. MA

NIP: 197103021997032003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sumatra Utara

Dr. Zulham SHI. M.Hum

NIP: 197703212009011008

IKHTISAR

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, serta mengetahui bagaimana Implementasi fatwa MUI tentang haramnya golput di Kecamatan Gunung Meriah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, pada lima Desa yaitu Desa Rimo, Desa Tanjung Betik, Desa Labuhan Kera, Desa Sianjo-Anjo, dan Desa Penjahitan. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Meriah. Objek pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan analisis data dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Gunung Meriah ada sebanyak 56 persen responden yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan responden yang mengetahui manfaat dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut sekitar 63 persen. Dan responden yang tidak mengetahui adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya golput itu sebanyak 94 persen. Itu berarti fatwa MUI tentang haramnya golput tersebut kurang berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah pada pilpres tahun 2014. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan Tentang partisipasi masyarakat tersebut masih sangat kurang atau rendah, dimana sebagai faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. adanya agenda lain pada hari “H” pencoblosan sehingga masyarakat tidak dapat ikut untuk memilih pada saat pemilihan.
2. adanya sikap pesimis terhadap siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin.
3. tidak ada implementasi langsung kepada masyarakat dari KIP/KPU, berbeda dengan PILEG atau PILKADA yang langsung berimplementasi kepada masyarakat.
4. masyarakat kurang menaruh simpati terhadap pilpres ini, karena masyarakat berpikir presiden ini terlalu jauh dari mereka.

Dengan adanya fatwa MUI tentang haramnya golput tersebut belum menjadikan sebuah dorongan bagi masyarakat agar terus meningkatkan partisipasinya dalam pemilu, ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi di masyarakat Kecamatan Gunung Meriah yang masih sangat rendah/kurang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

IKHTISAR

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Waktu danTempat Penelitian	15
G. Batasan Istilah	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Partisipasi Politik.....	19
B. Prilaku Pemilih.....	22
C. Faktor Penyebab Golput.....	23
D. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI)	25
E. Pengertian Golput.....	29
F. Fatwa Golput	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
H. Gambaran Umum Daerah Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kualitas Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah.....	54
B. Faktor Penyebab Tingginya Golput di Kecamatan Gunung Meriah	58
C. Implementasi Fatwa MUI Tentang Golput di Kecamatan GunungMeriah.....	62
D. Analisa Penulis.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, melalui penyelenggaraan pemilu inilah digantungkan harapan untuk dapat membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi, bertumpu pada kehendak rakyat dan mengabdikan pada tujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, partisipasi politik sejati rakyat, menjadi kunci utama keberhasilan dalam pemilu, dengan demikian masyarakat harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap hak-hak politik, rakyat sebagai pemilih akan dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas.

Pemilihan Umum adalah salah satu mekanisme demokrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme terhadap penyerahan

kedaulatan rakyat ini, akan dilakukan melalui wakilnya yaitu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut undang-undang nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian di lingkungan komisi pemilihan umum, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Pada saat ini pemilu secara Nasional dilakukan dua kali yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg), yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di Lembaga Legislatif, baik

¹. PKPU, Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pasal 1 (Ayat 1) Tentang Pemilihan Umum.

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Di samping itu, diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat.

Di Indonesia sendiri, Pemilihan Umum (Pemilu) pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah amandemen ke empat Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004.²

Pada tahun 2014 pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, KPU dibentuk secara berjenjang, mulai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dan bersifat tetap atau permanen. Bersifat tetap juga mengandung maksud pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat akan berlangsung terus-menerus. Sedangkan mandiri pemahamannya adalah dalam menyelenggarakan Pemilu bersifat independen tanpa ada campur

²Arifin Rahmat, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC, 1998), h. 76.

tangan/pengaruh pihak lain, baik pemerintah maupun partai politik. Di samping itu dimaksudkan agar pelayanan proses pendidikan politik yang berhubungan dengan Pemilu lebih berkesinambungan. Adapun dasar yang digunakan lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasca Reformasi adalah Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ketiga tahun 2002 yaitu, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.³

Tepat tiga bulan setelah Pemilu DPR, DPD dan DPRD sukses digelar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014. Sesuai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan Pilpres 2014 dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan Pemerintahan Negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

Penyelenggaraan Pilpres 2014 juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif. Presiden dan Wakil Presiden terpilih

³. MPR. RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Dan Ketetapan MPR RI*, (Jakarta: 2012), h. 145.

tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

Sama dengan Pilpres 2009, payung hukum Pilpres 2014 adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu point penting Undang-undang ini adalah bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Hasilnya, Pemilu 2014 diikuti dua pasangan calon yaitu Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun walaupun berlandaskan undang-undang yang sama, terdapat beberapa perbedaan terutama dalam teknis pelaksanaan pemilihan salah satunya tata cara memilih yang sebelumnya pada Pemilu 2009 mencontreng, pada Pemilu 2014 menjadi mencoblos. Alur penghitungan suara juga terdapat perbedaan di mana pada Pemilu 2014 terdapat penghitungan suara

di Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara yang pada Pemilu 2009 tidak ada. Semua perubahan ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Dengan jumlah Pemilih sebanyak 190.307.134 orang dan diselenggarakan di 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota dan 479.183 TPS di dalam dan luar negeri, pilpres 2014 telah berlangsung dengan Luber, Jujur, dan Adil, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar berdasarkan kehendak rakyat.⁴

Kabupaten Aceh Singkil merupakan kecamatan hasil dari pemekaran Kabupaten induk yaitu Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827), yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Simpang Kiri.

Kecamatan Gunung Meriah merupakan kecamatan hasil dari pemekaran dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Simpang Kanan,

⁴ Husni Kamil Manik Dkk, *Buku Data Dan Infografik Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum 2014), h 6.

Kecamatan Gunung Meriah disahkan menjadi kecamatan definitive berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil terbagi dalam 4 (empat) Daerah Pemilihan.

Kecamatan Gunung Meriah merupakan Daerah Pemilihan 2 (dua) yang tersendiri tidak tergabung dengan kecamatan lainnya dikarenakan Kecamatan Gunung Meriah memiliki jumlah penduduk terbanyak sehingga mempengaruhi terhadap jumlah pemilih terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan ataupun Daerah Pemilihan lainnya.

Kecamatan Gunung Meriah terdiri dari 25 (dua puluh lima) desa dengan keragaman budaya, suku dan bahasa di antaranya Alas, Dairi, Pakpak, Jawa dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum lokasi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah yang terbanyak yaitu 64 (enam puluh empat) TPS.

Dari 25 desa dan 64 TPS tersebut terdapat sebanyak 24,016 daftar pemilih tetap di kecamatan Gunung Meriah, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 14,743 dari total pemilih 24,016.

Bila dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Gunung Meriah dalam menggunakan hak pilihnya pada pilpres tahun 2014, jumlah angka golongan putih (golput) cukuplah tinggi berkisar sebesar 35,8 persen.⁵

Menurut Keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Januari 2009/29 Muharram 1430 H, mengenai golput hukumnya haram pada pemilu dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepetingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imaroh dalam kehidupan bersama.

⁵.<http://portal.radioantero.com/aceh/memilih>. (di unduh pada 20 februari 2017)

3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.⁶

Hasil penelitian sementara di lapangan, dimana penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Gunung Meriah, berdasarkan hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini belum terlalu tersosialisasikan di masyarakat Gunung Meriah, ini menurut penulis terbukti karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fatwa Majelis Ulama Islam tersebut sehingga angka golput di Kecamatan Gunung Meriah ini cukup tinggi sekitar 35,8 persen.

⁶. H.M. Anto Mudzar, Hairul Fuad Yusuf, *Fawa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Puslitbag Leture Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag Dn Kementrian Agama, 2012), h. 430.

Ini dapat dilihat dari wawancara langsung yang penulis lakukan kepada masyarakat muslim di Kecamatan Gunung Meriah :

Pertama: Wawancara dengan salah satu warga Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah bernama Rojikin seorang petani. Ia mengatakan bahwa ia sedang sibuk bekerja sehingga tidak sempat untuk memilih pada pemilu Presiden kemarin, ketika penulis menanyakan tentang fatwa MUI tentang haramnya golput, ia pun mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui adanya Fatwa tersebut.⁷

Kedua: Wawancara dengan seorang tukang becak bernama Gidang. Ketika penulis bertanya tentang fatwa MUI tersebut, beliau mengatakan bahwa fatwa MUI tersebut belum sama sekali pernah beliau dengar. Dan ketika waktu pilpres kemarin beliau tidak sempat memilih karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai tukang becak.⁸

Masyarakat Gunung Meriah ini memiliki alasan tersendiri mengapa harus mengenyampingkan ketertarikan mereka terhadap aktifitas politik.

Penulis memilih lokasi di Kecamatan Gunung Meriah sebagai tempat penelitian dikarenakan sebagian besar masyarakatnya beragama muslim,

⁷. Rojikin, Petani, Wawancara Pribadi, Gunung Meriah, 7 Maret 2017

⁸. Gidang Tukang Becak, Wawancara Pribadi, Gunung Meriah. 7 Maret 2017.

sekitar 39,725 jiwa atau sebanyak 93,51 persen, Kristen dengan jumlah 2,749 jiwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul. Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah dalam pemilihan presiden tahun 2014?
2. Apakah faktor penyebab tingginya golput di Kecamatan Gunung Meriah?
3. Bagaimanakah implementasi fatwa MUI mengenai haramnya Golput di Kecamatan Gunung Meriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah pada pemilu presiden tahun 2014

2. Untuk mengetahui implementasi fatwa MUI mengenai haramnya golput di Kecamatan Gunung Meriah.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya golput di Kecamatan Gunung Meriah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana kualitas partisipasi politik masyarakat pada pilpres 2014 di Kecamatan Gunung Meriah.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Gunung Meriah dan secara umum di seluruh Kabupaten Aceh Singkil pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang menjadi lebih baik.

E. Metode penelitian

Penelitian tentang Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI. Adalah penelitian Kualitatif.

Adapun langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Sumber DLata

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informan penelitian, yaitu Bapak Camat Kecamatan Gunung Meriah, para tokoh-tokoh Ulama, serta para masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah.
- b. Data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

2. Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui:

- a. *Library reserch*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b. *Observasi* diarahkan pada kegiatan perhatian secara akurat, mencatat semua fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini observasi merupakan alat bantu untuk tambahan informasi dan data lapangan. Hal yang akan diobservasi adalah gambaran umum

kondisi lingkungan selama proses wawancara berlangsung, untuk itu agar data yang dikumpulkan dengan valid, peneliti menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti alat tulis, catatan-catatan, dan lain-lain

- c. *Interview*/ wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Disini peneliti akan berusaha menggali informasi tentang bagaimana “Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput”.
- d. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian,

mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.

F. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dalam rentang waktu dua bulan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

G. Batasan Istilah

Untuk membahas judul “Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah

Terkait Fatwa MUI Tentang Golput”. Ada beberapa istilah dasar yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.⁹
2. Masyarakat adalah masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem/aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat.¹⁰
3. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan

⁹ Badri khairuman Dkk, Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput, (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), h. 69.

¹⁰ Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) h,130

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹¹

4. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.¹²

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.¹³

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini disusun menjadi lima Bab yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, h. 4.

¹² K.H. Ma'ruf Amin, Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h .50.

¹³ Diklat Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Puslitbang, 2012), h. 166.

Bab kedua berisikan pembahasan yaitu tentang partisipasi politik, perilaku pemilih, faktor penyebab golput, sejarah terbentuknya MUI, pengertian golput, fatwa golput, dan hipotesa

Bab ketiga berisikan metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan gambaran umum daerah penelitian.

Bab ke empat, membahas tentang Kualitas Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah, Faktor penyebab tingginya golput di Kecamatan Gunung Meriah, Implementasi fatwa MUI tentang golput di Kecamatan Gunung Meriah dan analisa penulis.

Sedangkan pada bab yang kelima merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang penulis anggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. partisipasi politik dapat juga dipahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Ramlan Subakti partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹⁴ Sudijono Sastroadmojo mengartikan partisipasi politik adalah sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan.¹⁵

Hobbert Meclosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka

¹⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1992), h. 25.

¹⁵ Sudijono Sastroadmojo, *Prilaku Politik*, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995), h. 77.

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam pembentukan kebijakan umum.¹⁶ Berdasarkan definisi ini, partisipasi masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif. Dimana setiap anggota masyarakat, seyogyanya memberikan suara dalam pemilu. Dan juga di jelaskan bahwa kegiatan suka rela adalah dimana dalam pelaksanaan pemberian suara dalam pemilihan tanpa pengaruh paksaan dari siapapun.

Gabrien Almond bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya sebatas pada kegiatan suka rela saja yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun.

Partisipasi politik dapat pula dikategorikan sebagai jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Maksudnya seseorang yang ikut memberikan keputusan politik lewat kegiatan politik. sebaliknya partisipasi secara kolektif tentu menyangkut kegiatan warga Negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti penguasa dalam proses pemilihan.

¹⁶ Hobbert Meclosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), h. 3.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington partisipasi politik juga yang mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal.

Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak, langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.¹⁷

Ramlan Surbakti mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua bagian yaitu :

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *infut* dan *outfut* politik. yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

¹⁷ Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), h. 67.

2. Partisipasi Pasif

Partisipasi Pasif adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah.¹⁸

B. Prilaku Memilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama calon untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan. Menyatakan memilih dalam pemilu yaitu mereka yang telah terdaptar sebagai peserta oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa peserta maupun masyarakat pada umumnya.

Prilaku pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin dalam pemilu secara langsung. Pemberian suara atau voting secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil. Pemberian suara dalam

¹⁸ Almond dan Mochtar Masoed, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001), h 67.

pemilu secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara kepada pasangan calon pemimpin yang akan dipilih.

C. Faktor Penyebab Golput

Golput adalah suatu hal yang selalu ada disetiap pemilu. Apalagi terhadap Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu Negara maka semakin sedikit angka pengembalian suara.¹⁹ Idris Thaha dalam bukunya menuliskan, ada dua faktor yang menyebabkan partisipasi warga Negara dalam politik. pertama, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kedua, sikap dan kepercayaan atau penilaian warga Negara terhadap pemerintah. akan tetapi, keduanya tidak bisa berdiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dipengaruhi juga oleh faktor lain. Misalnya status sosial dan ekonomi, aflikasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Badri Khairuman mengungkapkan tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidakikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik,

¹⁹ *Ibid*, h. 296.

termasuk dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum disebabkan oleh tiga faktor.

Pertama, apatis (masa bodoh), sikap ini lebih sekedar manipulasi keperibadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik.

Kedua, anomi (terpisah) sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia merasa tidak dapat memengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata anomi adalah sikap, hal ini menjadi ekstrem dan meluas akan mencakup sesuatu perasaan ketidakberdayaan dalam mengendalikan hidup secara umum.

Ketiga, alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomi. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan

tetapi iya juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan hijrah.²⁰

Adapun perilaku memilih menurut Ramlan Surbakti adalah aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum, bila pemilih memutuskan untuk memilih, pemilih akan memilih dan mendukung kandidat tersebut.²¹

D. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Inonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta, sebagai hasil Musyawarah

²⁰ Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Penomona Golput*, h 87-88

²¹ *Ramlan Surbakti*, h 170.

Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 sampai 18 Rajab 1935 H atau 21 sampai 27 Juli di balai sidang Jakarta.²²

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam, berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang di tanda tangani oleh 53 orang Ulama yang terdiri dari 26 orang ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, 10 orang unsur Ulama Organisasi Islam tingkat pusat yaitu Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Mesjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah. 4 orang dari Dinas Rohaniyah Islam AD, AL, AU dan POLRI, serta 14 orang Ulama undangan perorangan.²³

Dari musyawarah Nasional I tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDINYA MUI" yang di tanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian di sebut Musyawarah Nasional Ulama I.

²² Diklat Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Puslitbang, 2012), h. 166.

²³ *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : MUI, 1995), h 13.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka., dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi. Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyangkan batas etika dan moral., serta budaya global yang didominasi Barat serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat islam.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecendrungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat islam dapat

terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI makin di rasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya peraturan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT, memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar Organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan empat fungsi dan peran utama MUI yaitu :

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi
2. Sebagai pemberi fatwa
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat
4. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar.²⁴

E. Pengertian Golput

Golput atau “golongan putih” adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula didefenisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.²⁵

Dalam literatur perilaku memilih, penjelasan golput merujuk pada perilaku non voting. Perilaku non voting umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tiadanya motivasi. Perilaku tidak memilih seperti ini biasanya dipakai oleh para pemilih

²⁴ *Ibid*, h.17

²⁵ Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta : PT Nimas Multima, 2004), h 69.

sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Bentuk semacam ini juga banyak ditemui di Negara-negara yang merupakan hukum wajib coblos seperti Australia, Belgia, Italia, Brazil dan yang lainnya.²⁶

F. Fatwa Golput

Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia di picu oleh tiga hal yaitu:

1. Seruan dari Abdurrahman Wahid kepada khalayak ramai agar tidak memilih pada pemilu 2009. Suara Gus Dur mewakili sekian kekecewaan masyarakat yang tengah mendapati gambaran politik negeri yang tidak kunjung beranjak dari kondisi prihatin. Terlebih melihat fenomena para caleg yang cenderung nyalon untuk cari kerja, simpati, dan kejar proyek semata, tanpa mengedepankan komitmen memperjuangkan agenda-agenda berdimensi kerakyatan.

Disisi lain diakui atau tidak, faktor ini berangkat dari kekecewaan Gus Dur atau sikap KPU yang secara sepihak menghakimi masalah internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seperti di ketahui kekecewaan Gus Dur atas kinerja KPU dan pemerintah ini kemudian

²⁶ Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya : Jawa Pos Press, 2004), h 241-242.

meluap menjadi untuk tidak memilih pada pemilu. Pasca “kompanye” itu isu golput begitu mengemuka, memanas dan berbalas komentar para politisi dan beberapa kalangan yang terganggu kepentingannya. Tidak tanggung-tanggung ketua MPR Hidayat Nurwahid berikut dengan Organisasi Nahdatu Ulama dan Muhammadiyah membujuk MUI untuk segera membendung agar kekecewaan Gus Dur ini tidak meluas meenjadi “kekecewaan *grass root*”.

2. Dalam perspektif agama sikap golput itu di pandang sebagai pengingkaran terhadap *nashbul immah* (menegakkan kepemimpinan). Artinya dengan tidak memilih maka hilanglah pahala *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) itu. dengan dasar inilah MUI meminimalkan bila perlu menghilangkan budaya sungkan untuk menentukan pemimpinnya dalam ajang pemilu.
3. Dalam kerangka yang lebih praktis faktor ketiga kiranya lebih kuat lagi yaitu Fikih. Beberapa kalangan islam bahkan memunculkan kaedah-kaedah *ushul fiqh* untuk memperkuat alasan agar menjauh dari sikap anti pilih pemimpin itu. Bahwa meski hukum awal memilih itu adalah *fardhu kifayah*, namun kerugian (*mafsadah*) akibat sikap apatis dari

golput ini akan cenderung lebih berbahaya *Daf'u al- mafsadah al-Qubra Wajalbul Mashlahah al-Qubra* atau sebuah pertimbangan mencegah dampak negatif yang lebih besar, akhirnya menjadi dasar utama dan melengkapi faktor kedua.

Pada tanggal 26 Januari 2009/29 Muharram 1430 H, komisi tersebut berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai golput pada pemilu, dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat islam, hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.²⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MUI akhirnya merekomendasikan bahwa:

1. Umat islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar ma'ruf nahi mungkar*.
2. Pemerintah penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.²⁸

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan pergeseran paradigma MUI di era reformasi MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecendrungan telah memasuki ranah politik.

Hal ini mengingat bahwa MUI adalah lembaga ulama yang merupakan

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III tahun 2009* (Jakarta: MUI, 2009), h 23.

²⁸ *Ibid*, h 24.

representasi Islam dan lembaga Islam. MUI dapat di tuding sedang bermain mata dengan pemerintah yang sedang berkuasa atau partai tertentu, meskipun keluarnya fatwa ini dengan latar belakang yang di jelaskan di atas. Terbukti setelah fatwa ini dikeluarkan banyak pihak yang menganggap bahwa MUI tidak berkompeten dan tidak memiliki wewenang untuk mengharamkan golput. Dalam hal ini MUI tampak kebingungan antara memenuhi harapan partai-partai politik, Ormas Islam, pemerintah atau masyarakat awam.

Dalam menetapkan fatwa berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan dalil-dalil lainnya seperti istihsan, maslahah mursalah dan juga pendapat ulama. Metode ini jelas mengikuti metode klasik yang dalam sistem perundang -undangan, dimulai dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dalam menetapkan fatwa mengenai haramnya golput, MUI memiliki dasar argumentasi yang digali dari al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Berikut adalah petikan dasar-dasar argumentasi yang dikemukakan MUI:

1. Al Qur'an

Surat An-nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasulnya (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁹.*

2. Hadits Nabi SAW:

عن كثر بن عبد الله بن عمر بن عوف المجاني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم

إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما (رواه الترمذي)

*Artinya: Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf Almuzani dari
bapaknya dari kakeknya rasulullah SAW bersabda, Perjanjian boleh
dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan
yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin harus*

²⁹. Departemen Agama RI, *Alqur'an Tajwid Warna Dan Terjemahnya*, (Jakarta :
Bumi Aksara, 2002) h, 87

memenuhi syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”. (HR At-Tirmidzi).³⁰

Hadits Nabi SAW :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال من خلع يدا من طعة لقي الله يوما القيامة لا حجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (راوه البخري)

Artinya: Dari Ibnu Umar R.a Rasulullah bersabda barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan pada pemimpin, maka ia pasti bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa argumen yang membelanya. Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati dengan cara mati jahiliyah. (HR Bukhari).³¹

3. Pendapat sahabat

Pernyataan Abu Bakar RA, ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai Khalifah:

“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Kalau aku menjalankan tugasku dengan baik, bantulah aku. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di

³⁰ Moh Zuhri, Dkk, *Terjemah Sunan Attarmizi*, (Semarang: CV Assyifa, 2011), h. 665.

³¹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Sahih Bukhori*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 423.

kalangan kamu adalah kuat dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya, sebaliknya orang kuat di antara kalian aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi selama saya tidak taat pada Allah dan Rasulnya, gugurlah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanla shalat, Allah akan memberikanmu rahmat.”³²

Pernyataan Umar RA ketika dikukuhkan sebagai Khalifah, beliau berpidato:

“Barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan, maka luruskanlah aku....”³³

4. Pendapat Ulama

Al-Mawardi

Kepemimpinan (*imamah*) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasrkan *ijama'*

³² Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h 46-47

³³ Diklat Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, h. 171-174

ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib.³⁴

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *imamah* hukumnya wajib, maka status wajibnya adalah *fardhu kifayah* seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya jika seseorang yang telah diangkat sebagai imam gugurlah kewajiban mengakat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah.³⁵

Pada poin pertama, MUI menggunakan ayat al-Qur'an yang menyuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, serta *ulil amri* (pemimpin). Penggunaan ayat ini karena di samping tidak terdapat ayat al-Qur'an yang secara langsung berbicara mengenai keharaman golput, ayat ini relevan untuk menyuruh orang untuk taat kepada *ulil amri* dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Poin 2, adalah kutipan hadits Nabi SAW. Hadits nomor 1 berisi peringatan bahwa perjanjian yang dibolehkan hanyalah perjanjian yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tampaknya,

³⁴ Imam Al-mawardi, Penerjemah, Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), h. 9.

³⁵ *Ibid*, h. 10.

hadits ini dipakai MUI sebagai qiyas untuk memperingatkan perilaku golput berjamaah dan terorganisir. Sedangkan hadits ke-2 adalah keharusan sumpah setia (baiat) pada pemimpin, senada dengan ayat pada poin 1.

Poin 3 qaul al-Shahabat (pendapat Sahabat). Keduanya pendapat tersebut tampak seirama dalam hal keharusan memilih pemimpin dan beramar ma'ruf.

Sementara itu 4 adalah pendapat ulama, terutama menyangkut masalah politik. Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah adalah dua ulama khalaf yang sangat terkenal dan mumpuni dalam soal pemikiran politik Islam. Pendapat dua ulama ini langsung berbicara pada kewajiban menegakkan imamah sebagai sarana untuk menegakkan agama. Dengan kata lain, golput dianggap sebagai tindakan yang menentang imamah, maka golput adalah haram.

Keseluruhan dasar hukum yang dipakai oleh MUI itu pada dasarnya menegaskan tentang kewajiban memberikan suara pada pemilu sebagai sarana menegakkan imamah. Dalam hal ini, argumentasi normatif yang dipakai oleh MUI sifanya maudu'i (tematik). Artinya, dalam proses

pendalilan, MUI mencari ayat, hadits, pendapat Sahabat, dan atau pendapat ulama yang relevan untuk mengharamkan golput.

Selain itu pula, argumentasi normatif yang dipakai oleh MUI sifatnya lemah, ³⁶

³⁶*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, h. 175.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum jenis penelitian itu ada dua yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini berbentuk lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang ada atau memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput.

Sebagian penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan apa yang terjadi.

Berdasarkan tempat penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berupaya mengumpulkan data lapangan dengan dukungan literature yang relevan untuk mengkaji Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu mengemukakan fakta-fakta yang di temukan dilapangan sebagaimana adanya. Fakta-fakta tersebut kemudian di analisis sedemikian rupa untuk memberikan bobot pada penelitian ini.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini lebih menekankan faktor sosiologis dalam membentuk prilaku politik seseorang. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk prilaku memilih seseorang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Gunung Meriah ini terdiri dari 25 desa namun dari 25 desa tersebut penulis hanya mengambil lima Desa yaitu, Desa Rimo, Desa Sianjo-Anjo, Desa Tanjung Betik, Desa Penjahitan, dan Desa Labuhan Kera.

C. Populasi dan Sampel

Kecamatan Gunung Meriah memiliki jumlah penduduk sebesar 31.775 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Gunung Meriah secara umum dapat dikatakan sebagai sentra bisnis di kawasan Kabupaten Aceh Singkil.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu presiden tahun 2014. Populasi tersebut terdiri dari masyarakat Desa Rimo, Desa Sianjo-Anjo, Desa tanjung Betik, Desa Penjahitan, dan Desa Labuhan Kera.

Berbeda dengan penelitian Kuantitatif yang menetapkan jumlah sampel, dalam penelitian ini tidak ditentukan jumlah sampel dari masing-masing unsur dalam menetapkan informan penelitian. Peneliti meminta kepada seorang informan untuk menunjuk informan lain untuk dimintai informasi.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah atribut yang melekat pada subjek penelitian yang ingin diteliti. Atribut tersebut dapat berupa sifat, tingkah laku, norma keyakinan dan sebagainya. Penelitian ini merupakan studi terhadap Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput.

Subjek penelitian adalah penulis atau lembaga yang padanya terdapat atribut yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian objek penelitian nya

adalah masyarakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah, karena dipandang sebagai sebuah kelompok yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal yang sama. Kelompok ini dipilih dengan mengesampingkan etnis, profesi atau budaya.

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini yaitu berupa :

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya atau responden, yang diperoleh melalui angket dan wawancara dengan melakukan interviu dengan narasumber dan responden atau sampel yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, internet, surat kabar, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber atau informan melalui Tanya jawab dengan lisan.

2. Angket

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpul data maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut. Yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, tahap akhir adalah penyimpulan data, yaitu dengan menarik kesimpulan dengan metode induktif.

H. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Profil Kecamatan Gunung Meriah

a. Proses Pembentukan Kecamatan Gunung Meriah

Kabupaten Aceh Singkil merupakan kecamatan hasil dari pemekaran kabupaten induk yaitu Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827), yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Simpang Kiri.

Kecamatan Gunung Meriah merupakan kecamatan hasil dari pemekaran dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah disahkan menjadi kecamatan definitive berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

b. Letak Geografis Kecamatan Gunung Meriah.

Kecamatan Gunung Meriah merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak kurang lebih 40 km dari ibu

kota Kabupaten Aceh Singkil. Kecamatan Gunung Meriah berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Danau Paris.
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkil Utara.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Baharu.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan.³⁷

c. Karakteristik Penduduk Kecamatan Gunung Meriah

Kecamatan Gunung Meriah memiliki keanekaragaman dan karakteristik penduduknya, dalam hal ini dapat dibagi dalam karakteristik Berdasarkan Kelompok Umur.

Pada pertengahan tahun 2014 jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Meriah tercatat sebanyak 39.422. untuk lebih jelasnya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

³⁷ http://www.wikiwand.com/id/Gunung_Meriah_Aceh_Singkil, di unduh 25 Mei 2017

Tabel. 1
Karakteristik Berdasarkan Kelompok Umur.

NO	UMUR (Tahun)	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	0 s/d 4	2.894	7,34
2	5 s/d 9	4.443	11,27
3	10 s/d 14	4.522	11,47
4	5 s/d 19	4.001	10,15
5	20 s/d 24	4.195	10,64
6	25 s/d 29	4.486	11,38
7	30 s/d 34	3.868	9,81
8	35 s/d 39	2.948	7,48
9	40 s/d 44	2.443	6,2
10	45 s/d 49	1.774	4,42
11	50 s/d 54	1.229	3,3
12	55 s/d 59	914	2,32
13	60 s/d 64	533	1,35
14	65 s/d 69	427	1,08
15	70 s/d 74	304	0,77
16	74	401	1,02
	Jumlah	39.422	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2014.

d. Karakteristik Berdasarkan Mata Pencaharian.

Jika dilihat keadaan penduduk Kecamatan Gunung Meriah pada pertengahan tahun 2014 berdasarkan mata pencaharian penduduk, maka mata pencaharian utama terbesar sektor pertanian dalam arti luas yaitu sebesar 85,59% seperti petani, wiraswasta, dan karyawan swasta. Selain itu mata pencaharian penduduk terdiri dari peternak, pedagang, pegawai negeri

sipil, TNI, POLRI, dan lain-lain. Masing-masing jumlah tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel. 2
Karakteristik Berdasarkan Mata Pencaharian.

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Petani/perkebunan	3.712	34,55
2	PNS	964	8,97
3	TNI	66	0,62
4	Kepolisian RI (POLRI)	106	0,99
5	Anggota DPRK	8	0,07
6	Peternak	9	0,08
7	Pedagang	161	1,5
8	Karyawan Swasta	2.082	19,38
9	Karyawan BUMN	23	0,22
10	Transportasi	113	1,05
11	Industri	38	0,35
12	Wiraswasta	3.401	31,66
13	Dokter	13	0,12
14	Bidan	25	0,23
15	Perawat	22	0,21
Jumlah		10.743	10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2014

e. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan yang dimiliki sebahagian besar penduduk Kecamatan Gunung Meriah pada pertengahan 2014 adalah belum / tidak tamat SD yaitu sebanyak kurang lebih 43,83% dari total penduduk. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.

Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Belum/Tidak Tamat SD	17.623	42,21
2	Tamat SD	8.848	21,19
3	SLTP/Sederajat	6.106	14,61
4	SLTA/Sederajat	7.209	17,29
5	Diploma I/II	310	0,74
6	Akademi Diploma III	477	1,14
7	Strata I	1.148	2,75
8	Strata II	29	0,07
9	Strata III	1	0,002
Jumlah		41.746	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2014.

f. Karakteristik Berdasarkan Agama.

Pada pertengahan tahun 2014 Mayoritas Agama yang dianut sebahagian besar penduduk di Kecamatan Gunung Meriah adalah Islam dengan jumlah 39.725 jiwa atau sebanyak 93,51%, Kristen dengan jumlah 2.749 jiwa atau sebanyak 6,47%, Hindu dengan jumlah 5 jiwa atau sebanyak 0,01% dan lainnya sebanyak 2 jiwa atau sebanyak 0,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.

Karakteristik Berdasarkan Agama.

NO	AGAMA	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Islam	39.725	93,51
2	Kristen	2.749	6,47
3	Hindu	5	0,01
4	Lainnya	2	0,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2014.

g. Karakteristik Berdasarkan Kepala Keluarga.

Pada akhir tahun 2014 jumlah kepala keluarga di Kecamatan Gunung Meriah tercatat sebanyak 10.697 jiwa Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 5.

Karakteristik Berdasarkan Kepala Keluarga.

NO	DESA	JUMLAH KK (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Gunung Lagan	678	6,34
2	Sebatang	113	0,11
3	Tulaan	737	6,9
4	Sidorejo	923	8,63
5	Blok 15	500	4,67
6	Blok 18	177	1,65
7	Blok 31	96	0,9
8	Blok VI Baru	817	7,64
9	Rimo	1.013	9,47
10	Tanjung Betik	65	0,61
11	Penjahitan	48	0,45

12	Bukit Harapan	1.064	10
13	Cingkam	149	1,4
14	Labuhan Kera	39	0,36
15	Tanah Bara	600	5,6
16	Suka Makmur	565	5,3
17	Perangusan	103	0,96
18	Seping Baru	61	0,57
19	Tanah Merah	239	2,23
20	Pertampakan	66	0,62
21	Pandan Sari	649	6,07
22	Sanggaberu Siulusan	436	4,07
23	Tunas Harapan	310	2,9
24	Lae Butar	751	7,02
25	Sianjo-anjo	493	4,61
Jumlah		10.697	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2014.

h. Karakteristik Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan penduduk di Kecamatan Gunung Meriah pada pertengahan tahun 2014, jenis pekerjaan terbanyak adalah belum /tidak bekerja yaitu sebanyak kurang lebih 26,64% dari total penduduk masing-masing jumlah tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 6.

Karakteristik Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KK (Jiwa)	PERSENTASE (Persen)
1	Belum/Tidak Bekerja	10.501	26,64
2	IRT	7224	18,32
3	Pelajar/Mahasiswa	9.649	24,49
4	Pensiunan	69	0,17
5	PNS/TNI/POLRI	1.136	2,88
6	Perdagangan	198	0,5
7	Petani/perkebunan	3.712	9,42
8	Peternak	9	0,02
9	Nelayan/perikanan	25	0,06

10	Industri	38	0,01
11	Konstruksi	34	0,09
12	Transfortasi	113	0,29
13	Karyawan Swasta	2.082	5,28
14	Karyawan BUMN	23	0,06
15	Karyawan BUMD	10	0,03
16	Karyawan Honorer	127	0,32
17	Buruh Harian Lepas	212	0,54
18	Buruh Tani	166	0,42
19	Tukang Batu	26	0,07
20	Tukang Jahit	16	0,04
21	Mekanit	27	0,07
22	Wartawan	5	0,03
23	Ust/Muballigh	12	0,03
24	Anggota DPRK	8	0,02
25	Dokter	13	0,03
26	Bidan	25	0,06
27	Perawat	22	0,05
28	Supir	178	0,44
29	Pedagang	161	0,41
30	Wiraswasta	3.401	8,63
31	Lain-lain	205	0,52
Jumlah		39.422	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Gunung Meriah

Kalau kita lihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 di Kecamatan Gunung Meriah sangatlah rendah itu dapat kita ketahui dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebanyak 24,016 jiwa sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 14,743 jiwa dan yang tidak menggunakan hak pilihnya itu sebanyak 9273 jiwa, artinya golput di Kecamatan Gunung Meriah ini sangatlah tinggi. Untuk mengetahui lebih jelas dapat kita lihat tabel di bawah ini.

Tabel VII

**Daftar pemilih tetap (DPT) pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
di Kecamatan Gunung Meriah**

NO	DATA PEMILIH	JENIS KELAMAIN	JUMLAH
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	12,091
		Perempuan	11,925
		Jumlah	24,016

Tabel VIII

Data Suara Sah Dan Tidak Sah Di Kecamatan Gunung Meriah

NO	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
1	Jumlah suara sah	14.608
2	Jumlah suara tidak sah	135
3	Jumlah suara sah dan tidak sah	14.743

Sumber : Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh Singkil, Tahun 2014

1. Pengetahuan Responden Mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mengetahui pengetahuan/pemahaman responden mengenai pemilu dapat kita lihat tabel di bawah ini.

Tabel IX

Pegetahuan responden mengenai pemilu

Presiden dan Wakil Presiden

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (PERSEN)
1	Tahu	44	88
2	Tidak tahu	12	12
3	Ragu-ragu	0	0
Jumlah		100	100

Bila dilihat dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa kebanyakan responden yang muslim di Kecamatan Gunung Meriah mengetahui tentang

apa itu pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebanyak 88 persen, sedangkan yang tidak mengetahui tentang pemilu Presiden tersebut sebanyak 12 persen.

Kemudian untuk mengetahui apakah responden mengetahui manfaat dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka dapat kita lihat tabel di bawah ini.

Tabel X
Pengetahuan Responden Tentang Manfaat Dari Pemilu
Presiden Dan Wakil Presiden.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (PERSEN)
1	Tahu	38	82
2	Tidak tahu	18	18
3	Ragu-ragu	0	0
Jumlah		100	100

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang manfaat dari pemilu presiden dan wakil presiden yaitu sekitar 82 persen, sedangkan responden yang tidak mengetahui manfaat dari pemilu tersebut lebih rendah di banding yang mengetahui yaitu sekitar 18 persen, dan responden yang masih ragu-ragu itu sekitar 0 persen.

Kemudian untuk mengetahui apakah responden terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel XI
Responden Yang Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (PERSEN)
1	Iya	56	100
2	Tidak	0	0
3	Ragu-ragu	0	0
Jumlah		100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua responden yang penulis ambil terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu presiden tahun 2014 kemarin yaitu sebanyak 56 orang atau 100 persen, sedangkan responden yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap itu sekitar 0 persen.

Dengan demikian setelah kita ketahui bahwa responden terdaftar sebagai pemilih tetap, maka perlu kita ketahui apakah responden tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam pemilu presiden dan wakil presiden tersebut hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel XII

Responden yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (PERSEN)
1	Iya	0	0
2	Tidak	54	98
3	Ragu-ragu	2	2
Jumlah		100	100

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa lebih banyak responden yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput di bandingkan dengan responden yang menggunakan hak pilihnya, yaitu sekitar 98 persen dari responden yang mengatakan golput atau tidak memilih pada pemilu presiden dan Wakil Presiden kemaren, dan yang menggunakan hak pilihnya sekitar tidak ada 0 persen, dan yang masih ragu-ragu itu sekitar 2 persen.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa di Kecamatan Gunung Meriah partisipasi masyarakat masih rendah, kurangnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah tersebut kita perlu mengetahui apa alasan mereka mengapa tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

B. Faktor Penyebab Tingginya Golput Di Kecamatan Gunung Meriah

Tabel XIII

Faktor atau alasan responden tidak memilih (golput) pada saat pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 ini dapat kita lihat dari tabel berikut ini.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (PERSEN)
1	Sibuk	32	34
2	Malas	20	20
3	Kekacauan di TPS	2	2
3	Pesimis	2	2
Jumlah		56	56

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa berpariasi jawaban masyarakat Gunung Meriah dalam menggunakan hak pilihnya, mulai dari malas, sibuk dan lain sebagainya. Tabel di atas menyebutkan bahwa 34 persen dari responden yang mengatakan sibuk ketika saat pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemaren dan 20 persen dari mereka yang mengatakan malas untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Dari tabel di atas penulis analisis bahwa sebab-sebab responden tidak ikut serta/berpartisipasi dalam pilpres tahun 2014 kemaren sebagaimana yang di ungkapkan oleh beberapa responden sebagai berikut:

Suhardi masyarakat Labuhan Kera, beliau mengatakan bahwa pada saat pemilu iya sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga beliau tidak sempat ikut untuk memilih pada pilpres kemaren.³⁸

Jaharuddin masyarakat Tanjung Betik, juga mengatakan bahwa pemilihan presiden ini hanyalah ajang perlombaan saja bagi para calon setelah mereka terpilih nanti mereka tidak akan pernah tahu bagaimana nasib rakyat nya apalagi di pelosok Desa, jadi tak ada gunanya saya memilih karena mereka juga nantinya tidak akan tau nasib kami sebagai rakyatnya toh kami tetap akan seperti ini tidak ada perubahan.³⁹

Begitu juga dengan siti Rohani salah satu masyarakat Desa Rimo, beliau mengatakan bingung ketika saat hari “H” pemilihan, dikarenakan seharusnya beliau memilih di TPS “B” dan akhirnya harus memilih di TPS C inilah yang membuat saya tidak memilih (malas) pada saat itu ujar beliau.⁴⁰

Selain itu Buk Fatma salah seorang ibu rumah tangga (IRT) masyarakat Desa Penjahitan juga mengungkapkan ketika penulis bertanya mengapa tidak memilih, beliau mengatakan bahwa dia malas menggunakan

³⁸ Suhardi, Masyarakat Desa Labuhan Kera, Wawancara Pribadi, 19 April 2017.

³⁹ Jaharuddin, Masyarakat Desa Tanjung Betik, Wawancara Pribadi, 19 April 2017.

⁴⁰ Siti Rohani, Masyarakat Desa Rimo, Wawancara Pribadi, 20 April 2017.

hak suaranya karena presiden ini terlalu jauh dari mereka dan pula dia tidak kenal sama calon presiden makanya buk Fatma malas ikut memilih.⁴¹

Ali Hasmi Pohan, A.K.S.Msi, (Camat Gunung Meriah), beliau mengatakan bahwa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 itu di karenakan. Adanya agenda lain pada hari “H” pencoblosan yang tidak bisa dihindari bagi masyarakat sehingga mereka tidak dapat ikut untuk memilih pada saat itu. Adanya sikap pesimis terhadap siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, masyarakat menganggap kehidupan mereka tetap tidak terjadi perbaikan. Inilah menurut saya yang menjadi faktor penyebab terjadi golput di masyarakat Kecamatan Gunung Meriah.⁴²

Ihsan Darmawan SH, mengatakan bahwa penyebab terjadinya golput pada pemilu presiden itu kemungkinan besar dikarenakan pilpres itu tidak menyangkut langsung kemasyarakat, untuk sosialisasi atau ajakan sudah kami perintahkan kepada BPK untuk keliling menggunakan TOA di Kecamatan daerah masing-masing untuk mengajak masyarakat besok untuk memilih. Kedua, tidak ada implementasi langsung kepada masyarakat,

⁴¹ Fatma, Masyarakat Desa Penjahitan, Wawancara Pribadi, 20 April 2017.

⁴² Ali Hasmi Pohan, Camat, Kecamatan Gunung Meriah, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 April 2017

berbeda dengan PILEG atau PILKADA yang langsung berimplementasi kepada masyarakat jadi tingkat partisipasinya tinggi, ini lah yang menyebabkan masyarakat kurang menaruh simpati terhadap pilpres ini, karena masyarakat berpikir presiden ini terlalu jauh dari mereka berbeda dengan PILEG dan PILKADA.⁴³

Dari beberapa responden yang penulis wawancarai di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya golput pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, adanya agenda lain pada hari H bagi masyarakat sehingga tidak dapat ikut untuk menggunakan hak suaranya, adanya terjadi kekacauan di TPS yang membuat masyarakat malas untuk memilih, adanya sikap pesimis terhadap siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, dan kurangnya sosialisasi dari KIP/KPU kepada masyarakat tentang pemilu presiden ini sehingga masyarakat kurang tertarik terhadap pilpres ini.

C. Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Golput Di Kecamatan Gunung Meriah.

⁴³ Ihsan Darmawan SH, Kabak Umum KIP/KPU Aceh Singkil, Wawancara Pribadi Tanggal 21 April 2017

Mengenai Fawa Majelis Ulama Indonesia tentang golput itu sudah penulis jelaskan di Bab II yaitu, Majelis Ulama Indonesia berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai golput pada pemilu, dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat islam, hukumnya adalah wajib.

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.⁴⁴

Berbicara tentang implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum golput (tidak memilih dalam pemilu) di Kecamatan Gunung Meriah ini dapat kita ketahui melalui pengetahuan masyarakat tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut. Ini dapat kita lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel XIV

Pengetahuan responden mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum golput (tidak memilih pada pemilu).

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKWENSI	PERSENTASE (PERSEN)
1	Tahu	6	6
2	Tidak tahu	50	94
3	Ragu-ragu	0	0
Jumlah		100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Gunung Meriah yang tidak mengetahui dan bahkan masih ada responden yang belum pernah mendengar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*, h. 23.

hukum golput tersebut. Ada sebanyak 94 persen yang tidak mengetahui fatwa MUI tersebut dan hanya 6 persen saja responden yang mengetahui fatwa tersebut. Inilah kemungkinan salah satu penyebab tingginya angka golput di masyarakat Kecamatan Gunung Meriah.

Ali Hasmi Pohan, mengungkapkan bahwa di Kecamatan Gunung Meriah belum pernah ada semacam sosialisai langsung oleh Majelis Ulama Indonesia tentang hukum golput (tidak memilih pada pemilu) tersebut kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak MUI. Inilah yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya fatwa tersebut, hanya masyarakat yang jeli teknologi dan yang berpendidikan saja yang kemungkinan tahu adanya fatwa tersebut ujar beliau.⁴⁵

Kemudian setelah kita mengetahui pengetahuan masyarakat Gunung Meriah mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, perlu juga kita ketahui bagaimana tanggapan mereka tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum haramnya golput (tidak memilih). Ini dapat dilihat tabel berikut ini

⁴⁵ Ali Hasmi Pohan, Camat, Kecamatan Gunung Meriah, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 April 2017

Tabel. XV

Tanggapan responden mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum golput.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (PENSEN)
1	Bagus	53	97
2	Tidak bagus	3	3
3	Biasa saja	0	0
Jumlah		100	100

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa banyak responden yang mengatakan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut bagus yaitu sebanyak 97 persen, 3 persen tidak bagus dan 0 persen responden mengatakan biasa saja dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Artinya banyak responden yang mendukung adanya fatwa tersebut.

Makmur kepala Desa Tanjung Betik, mengatakan bahwa beliau sangat mendukung adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut karena dengan adanya fatwa tersebut bisa mendorong masyarakat untuk memilih dalam pemilu.⁴⁶

Rosman SH.I, juga menyatakan bahwa beliau sangat setuju dengan adanya fatwa Majelis Ulama Tersebut, karena islam sendiri menganjurkan

⁴⁶ Makmur, Kepala Desa Tanjung Betik, Wawancara Pribadi, 21 April 2017

untuk memilih pemimpin, karena didalam hadis nabi juga di jelaskan bahwa apabila tiga orang berjalan maka angkatlah salah satu di antara kalian untuk menjadi pemimpin apalagi kalau dalam sebuah Negara maka kita wajib untuk mengangkat salah satu diantara kita untuk menjadi pemimpin.⁴⁷

Kemudian setelah kita mengetahui tanggapan masyarakat/responden mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya adalah apa yang dilakukan responden setelah mengetahui fatwa tersebut.

⁴⁷ Rosman SH.I, Anggota Partai PKS, Wawancara Pribadi, 21 April 2017.

Tabel XVI

**Yang dilakukan responden setelah mengetahui fatwa Majelis Ulama
Indonesia tentang hukum golput (tidak memilih).**

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (PERSEN)
1	Menggunakan hak suaranya dalam pemilu	0	0
2	tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu	56	100
3	Ragu-ragu		
Jumlah		100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai apa yang dilakukan setelah mengetahui fatwa tersebut adalah semua responden menyatakan akan menggunakan hak suaranya yaitu 100 persen dan yang tidak mau menggunakan hak suaranya 0 persen dan yang masih ragu-ragu menggunakan atau tidak itu 0 persen. Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat di kecamatan gunung meriah sudah menyadari bahwa betapa pentingnya memilih pemimpin, sehingga Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya/tidak memilih, ini dapat penulis lihat dari

jawaban responden apa yang mereka lakukan setelah mengetahui fatwa tersebut.

Dari uraian dan penjabaran angket di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat/responden di Kecamatan Gunung Meriah itu lebih banyak yang tidak menggunakan hak suaranya dari pada yang menggunakan hak suaranya pada pemilu Presiden dan Wakil presiden tahun 2014 kemaren.

D. Analisa Penulis

Pada pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kemaren di Kecamatan Gunung Meriah masih banyak masyarakat/responden yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 56 persen sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 0 persen dan yang masih ragu-ragu 0 persen. Dari penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan anket dan wawancara kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Gunung Meriah masih banyak dari mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kemaren.

Kemudian dari hasil angket penelitian diketahui bahwa masyarakat/responden yang mengetahui manfaat dari pemilu Presiden dan

Wakil Presiden itu sebanyak 82 persen yang tidak mengetahui 18 persen dan yang masih ragu-ragu 0 persen.

Dalam putusan Majelis Ulama Indonesia tentang golput dalam pemilu, MUI sendiri merekomendasikan bahwa umat islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya dalam mengemban tugas *amar ma'ruf dan nahi mungkar*, dan pemerintah sebagai para penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Melihat fakta di lapangan bahwa fatwa Majelis Ulama tentang haramnya golput tersebut kurang berpengaruh terhadap masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kemaren di Kecamatan Gunung Meriah.

Kemudian masyarakat/responden yang mengetahui tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang golput itu sebanyak 6 persen saja dan yang tidak mengetahui fatwa tersebut sebanyak 94 persen. Ini artinya bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang golput tersebut belum tersosialisasikan

dengan baik sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang tidak mengetahui fatwa tersebut.

Oleh karena itu kebanyakan para responden/masyarakat mengungkapkan bahwa mereka tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 kemaren itu di karenakan oleh beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi dari pihak KIP/KPU sehingga mereka kurang tertarik terhadap Pilpres ini, adanya sikap pesimis terhadap siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi pemimpin mereka tetap seperti itu tidak ada perubahan terhadap mereka, adanya agenda lain bagi masyarakat pada hari H sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu tersebut, dan dari pihak MUI/MPU Aceh Singkil tidak ada langsung mensosialisasikan tentang fatwa haramnya golput tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu sama sekali tentang adanya fatwa keharaman golput.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Masih banyak masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang tidak menggunakan hak suaranya dari jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 24,016 jiwa sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 14,743 jiwa dan yang tidak menggunakan hak pilihnya itu sebanyak 9273 jiwa, artinya golput di Kecamatan Gunung Meriah ini sangatlah tinggi, dimana sebagai faktor penyebabnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Adanya agenda lain pada hari “H” pencoblosan yang tidak bisa dihindari bagi masyarakat sehingga mereka tidak dapat ikut untuk memilih pada saat pemilihan. Adanya sikap pesimis terhadap siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, masyarakat menganggap kehidupan mereka tetap tidak terjadi perbaikan.

Masyarakat kurang menaruh simpati terhadap pilpres ini, karena masyarakat berpikir presiden ini terlalu jauh dari mereka berbeda dengan

PILEG dan PILKADA. Tidak adanya implementasi langsung kepada masyarakat dari KIP/KPU, berbeda dengan PILEG atau PILKADA yang langsung berimplementasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik terhadap pemilihan tersebut. Dan di Kecamatan Gunung Meriah ini ada terjadi kekacauan di TPS sehingga masyarakat kebingungan dimana sebenarnya tempat mereka memilih sehingga akhirnya mereka malas untuk memilih.

Mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang golput di Kecamatan Gunung Meriah itu masih belum tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui fatwa tersebut. Dan tingkat partisipasi masyarakat setelah adanya fatwa MUI tersebut belum juga mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, karena masyarakat menganggap bahwa memilih itu adalah merupakan hak diri mereka sendiri.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah agar harus lebih memperhatikan tentang pemilu ini agar partisipasi masyarakat bisa ditingkatkan dan terus meningkat, dan pemilu yang akan datang partisipasi masyarakat

bisa semakin bertambah terkhusus di Kecamatan Gunung Meriah dan umumnya di seluruh Kabupaten Aceh Singkil. Dan pemerintah juga harus bisa menunjukkan pemerintah yang benar-benar bersih sehingga masyarakat bisa percaya dan memandang positif terhadap pemerintah.

2. Kepada Majelis Ulama Indonesia hendaknya lebih mensosialisasikan fatwa-fatwa, terkhusus tentang fatwa golput kepada masyarakat muslim agar masyarakat mengetahui fatwa tersebut, karena fatwa tersebut sangat di butuhkan oleh masyarakat banyak untuk menentukan pemimpin yang lebih kompeten dan paham akan agama.
3. Untuk penelitian yang akan datang, di harapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas suatu studi khususnya di bidang Siyasah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quranul karim.

Almawardi, Imam, Penerjemah, Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah*, Jakarta : Qisthi Press, 2014

Almond dan Masoed, Mochtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001)

Amin, K.H. Ma'ruf, Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta : Erlangga, 2011

Asfar, Muhammad, *Presiden Golput*, Surabaya : Jawa Pos Press, 2004

Darmawan, Ihsan SH, Kabak Umum KIP/KPU Aceh Singkil, Wawancara Pribadi Tanggal 21 April 2017

Departemen Agama RI, *Alqur'an Tajwid Warna Dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Diklat Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta : Puslitbang, 2012

Diklat Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta : Puslitbang, 2012

Fatma, Masyarakat Desa Penjahitan, Wawancara Pribadi, 20 April 2017.

Gidang Tukang Becak, Wawancara Pribadi, Gunung Meriah. 7 Maret 2017.

Hasmi, Ali Pohan, Camat, Kecamatan Gunung Meriah, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 April 2017

http://www.wikiwand.com/id/Gunung_Meriah_Aceh_Singkil, di unduh 25 Mei 2017

Huntington, Samuel P. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Renika Cipta, 1994

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001

Jaharuddin, Masyarakat Desa Tanjung Betik, Wawancara Pribadi, 19 April 2017.

Kamil Manik, Husni Dkk, *Buku Data Dan Infografik Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum 2014

Khairuman, Badri Dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, Jakarta: PT Nimas Multima, 2004

Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III tahun 2009* (Jakarta: MUI, 2009

Makmur, Kepala Desa Tanjung Betik, Wawancara Pribadi, 21 April 2017

Meclosky, Hobbert dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994

MPR. RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1994 Dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta: 2012

Mudzar, H.M. Anto, Hairul Fuad Yusuf, *Fawa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Puslitbag Leture Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag Dn Kementrian Agama, 2012

Nashiruddin, Muhammad, Albani, Ringkasan Sahih Bukhori, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

PKPU, Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pasal 1 (Ayat 1) Tentang Pemilihan Umum.

Rahma, Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: Penerbit SIC, 1998

Rojikin, Petani, Wawancara Pribadi, Gunung Meriah, 7 Maret 2017

Rosman SH.I, Anggota Partai PKS, Wawancara Pribadi, 21 April 2017.

Sastroadmojo, Sudijono, *Prilaku Politik*, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995

Siti Rohani, Masyarakat Desa Rimo, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 April 2017

Soekanto, Soerjono, sosiologi suatu pengantar, Jakarta : Rajawali Pers, 2017

Suhardi, Masyarakat Desa Labuhan Kera, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 April 2017

Surbakti, Ramlan *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1992

Terjemahnya, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) h, 87

Zuhri, Moh, Dkk, Terjemah Sunan Attarmizi, Semarang: CV Assyifa, 2011

20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : MUI, 1995